



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 6034 K/12/MEM/2016

TENTANG

HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*)
YANG DICAMPURKAN KE DALAM BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penggunaan bahan bakar nabati (*biofuel*) dan sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan terkait penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, perlu menata kembali penetapan harga indeks pasar bahan bakar nabati (*biofuel*) yang dicampurkan ke dalam jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1367);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG DICAMPURKAN KE DALAM BAHAN BAKAR MINYAK.

KESATU : Harga indeks pasar bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk jenis biodiesel yang dicampurkan ke dalam jenis bahan bakar minyak tertentu, didasarkan pada harga publikasi Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara untuk *Crude Palm Oil* (CPO) unit Belawan dan Dumai rata-rata periode 1 (satu) bulan sebelumnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ditambah besaran konversi CPO menjadi Biodiesel sebesar 125 USD/MT (seratus dua puluh lima dolar Amerika per metrik ton) dengan faktor konversi sebesar 870 kg/m³ (delapan ratus tujuh puluh kilogram per meter kubik), serta ditambah ongkos angkut dengan besaran maksimal untuk masing-masing titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga indeks pasar bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk jenis bioetanol yang dicampurkan ke dalam jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, didasarkan pada harga publikasi Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara untuk molasses/tetes tebu rata-rata periode 3 (tiga) bulan terakhir publikasi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dengan faktor konversi sebesar 4,125 Kg molases/liter etanol (empat koma seratus dua puluh lima kilogram molases per liter etanol) ditambah besaran konversi molases menjadi Bioetanol sebesar 0,25 USD/liter (dua puluh lima sen dolar Amerika per liter).

- KETIGA : Harga indeks pasar bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar pembayaran selisih kurang pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.
- KEEMPAT : Harga indeks pasar bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk jenis biodiesel yang dicampurkan ke dalam jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan patokan harga biodiesel sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.
- KELIMA : Besaran harga indeks pasar bahan bakar nabati (*biofuel*) yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
- KEENAM : Terhadap badan usaha yang telah menyalurkan bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk jenis biodiesel yang dicampurkan ke dalam jenis bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 yang besaran maksimal ongkos angkutnya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3239 K/12/MEM/2015, besaran maksimal ongkos angkutnya mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri ini.

- KETUJUH : Dalam hal ongkos angkut tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, besaran maksimal ongkos angkut diperhitungkan menggunakan jarak terdekat dari titik suplai ke lokasi titik serah yang sesuai jadinya dengan ongkos angkut terendah.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3239 K/12/MEM/2015 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
7. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6034 K/12/MEM/2016

TANGGAL : 1 Juli 2016

TENTANG

HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) YANG
DICAMPURKAN KE DALAM BAHAN BAKAR MINYAK

BESARAN MAKSIMAL ONGKOS ANGKUT
BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) JENIS BIODIESEL
YANG DICAMPURKAN KE DALAM JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
A. ACEH			
1.	Krueng Raya	Medan	285
2.	Lhokseumawe	Medan	200
3.	Meulaboh	Medan	370
4.	Sabang	Medan	600
5.	Simuelue Sinabang	Medan	980
B. SUMATERA UTARA			
6.	Medan*	Medan/Batam	116
7.	Medan**	Medan	23
8.	Pematang Siantar	Medan	132
9.	Kisaran	Medan	143
10.	Sibolga	Medan	245
11.	Gunung Sitoli, Nias	Medan	735
C. RIAU			
12.	Dumai	Dumai	52
13.	Siak	Dumai	320

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
14.	Tembilahan	Dumai	285
		Batam	285
D. KEPULAUAN RIAU			
15.	Kabil	Batam	0
16.	Tanjung Uban	Batam	215
		Panjang	218
17.	Bintan	Batam	109
E. SUMATERA BARAT			
18.	Teluk Kabung	Dumai	450
		Belawan	400
		Panjang	260
F. BANGKA BELITUNG			
19.	Pangkal Balam	Bayas-Riau	358
		Dumai	290
		Batam	300
		Panjang	220
20.	Jobber Tanjung Pandan	Bayas-Riau	358
		Dumai/Batam	548
		Panjang	220
G. JAMBI			
21.	Jambi	Dumai	250
		Batam	260
		Panjang	220
H. SUMATERA SELATAN			
22.	Kertapati	Bekasi	444
		Panjang	340
		Dumai	330
23.	Lahat	Dumai	690

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
		Panjang	400
24.	Baturaja	Dumai	640
		Panjang	400
25.	Lubuk Linggau	Dumai	625
		Panjang	590
I. BENGKULU			
26.	Pulau Baai	Dumai	475
		Panjang	300
J. LAMPUNG			
27.	Lampung	Dumai	346
		Panjang	175
28.	Panjang	Dumai	300
		Belawan	425
		Batam	250
		Panjang	80
K. BANTEN			
29.	Tanjung Gerem	Bekasi	131
		Dumai	360
		Belawan	418
		Batam	210
		Panjang	125
		Merak	83
L. DKI JAKARTA			
30.	Jakarta	Gresik/Bekasi/Tarjun	350
		Dumai	275
		Belawan	440
		Panjang	260

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
M. JAWA BARAT			
31.	Cikampek	Bekasi	66
		Panjang	305
32.	Ujung Berung	Bayas-Riau	475
		Bekasi	158
		Panjang	390
33.	Padalarang	Cilegon	263
		Bekasi	117
		Panjang	390
34.	Tasikmalaya	Bayas-Riau	578
		Bekasi	265
		Panjang	390
35.	Balongan	Dumai	300
		Bekasi	173
		Gresik	400
		Panjang	390
N. JAWA TENGAH			
36.	Tegal	Gresik	331
		Belawan	460
		Dumai	401
37.	Cilacap	Gresik	392
		Panjang	370
38.	Maos	Gresik	331
39.	Pengapon	Gresik	144
		Batam	230
40.	Semarang	Gresik	268
41.	Boyolali	Gresik	141
42.	Cepu	Gresik	226

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
O. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
43.	Rewulu	Gresik/Cilegon	147
P. JAWA TIMUR			
44.	Surabaya*	Gresik	130
		Batam	260
		Belawan	480
		Dumai	350
45.	Surabaya**	Gresik	70
46.	Tuban	Gresik/Kutai Timur	97
		Belawan	480
		Dumai	429
47.	Camplong	Gresik	109
48.	Tanjung Wangi	Gresik	314
		Batam	350
49.	Malang	Gresik	150
50.	Madiun	Gresik	265
Q. KALIMANTAN BARAT			
51.	Pontianak*	Pontianak/Batam	375
		Panjang	350
		Dumai	310
52.	Pontianak**	Pontianak/Batam	319
		Panjang	350
		Dumai	310
53.	Sintang	Pontianak	830
		Panjang	720
54.	Sanggau	Pontianak	680
		Panjang	600

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
R. KALIMANTAN TENGAH			
55.	Pangkalan Bun	Dumai	454
		Panjang	435
56.	Sampit	Dumai	776
		Panjang	610
57.	Pulang Pisau	Gresik/Tarjun	627
		Panjang	565
		Dumai	627
S. KALIMANTAN SELATAN			
58.	Banjarmasin	Gresik/Tarjun	296
		Panjang	435
		Belawan	540
		Dumai	367
		Batam	400
59.	Kotabaru*	Gresik	927
		Tarjun	400
		Panjang	855
60.	Kotabaru/Stagen**	Gresik	317
		Tarjun	250
		Panjang	855
T. KALIMANTAN TIMUR			
61.	Balikpapan	Dumai	695
		Tarjun	615
		Bitung	605
62.	Samarinda	Gresik	600
		Dumai	595
		Tarjun	525
63.	Jobber Berau	Gresik/Dumai	850

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
		Tarjun	750
U. KALIMANTAN UTARA			
64.	Tarakan	Gresik/Dumai	714
		Tarjun	625
		Bitung	355
V. BALI			
65.	Bali	Gresik	392
		Dumai/Tarjun	500
66.	Manggis	Gresik	392
		Dumai/Tarjun	530
67.	Sanggaran	Gresik	500
		Dumai	630
W. SULAWESI SELATAN			
68.	Makassar	Bitung	367
		Bekasi	450
		Gresik/Tarjun	307
		Dumai	500
69.	Palopo	Gresik/Tarjun	487
		Bitung	385
70.	Pare-pare	Gresik	274
		Tarjun	450
		Bitung	390
X. SULAWESI TENGAH			
71.	Donggala	Gresik/Tarjun	609
		Dumai	850
		Bitung	355
72.	Kolonedale	Gresik/Tarjun	613
		Bitung	305

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
73.	Luwuk	Gresik/Tarjun	646
		Bitung	335
74.	Moutong	Gresik/Tarjun	755
		Bitung	265
75.	Poso	Gresik/Tarjun	761
		Bitung	305
76.	Banggai	Gresik/Tarjun	596
		Bitung	220
77.	Toli-toli	Gresik/Tarjun	574
		Bitung	295
Y. SULAWESI TENGGARA			
78.	Bau Bau	Gresik/Tarjun	363
		Bitung	395
79.	Raha	Gresik/Tarjun	428
		Bitung	345
80.	Kolaka	Gresik/Tarjun	453
		Bitung	485
81.	Kendari	Gresik/Tarjun	477
		Bitung	315
Z. SULAWESI UTARA			
82.	Bitung	Dumai	595
		Gresik	367
		Bitung	125
83.	Tahuna	Gresik	775
		Bitung	250
AA. GORONTALO			
84.	Gorontalo	Gresik	720
		Bitung	220

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
BB. NUSA TENGGARA TIMUR			
85.	Kupang	Dumai	890
		Gresik	375
		Bitung	395
86.	Reo	Gresik	304
		Bitung	375
87.	Maumere	Gresik	375
		Bitung	360
88.	Ende	Gresik	390
		Bitung	360
89.	Waingapu	Gresik	347
		Bitung	450
90.	Atapupu	Gresik	508
		Bitung	375
91.	Kalabahi	Gresik	459
		Bitung	345
CC. NUSA TENGGARA BARAT			
92.	Ampenan	Gresik	156
		Tarjun	406
		Bitung	490
93.	Badas	Gresik	190
		Tarjun	440
		Bitung	465
94.	Bima	Gresik	246
		Tarjun	496
		Bitung	435

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
DD. MALUKU			
95.	Wayame	Panjang	900
		Gresik	529
		Tarjun	721
		Bitung	315
96.	Tual	Gresik	774
		Tarjun	947
		Bitung	520
97.	Aru	Gresik	832
		Tarjun	1005
		Bitung	565
98.	Bula	Gresik	807
		Tarjun	980
		Bitung	370
99.	Namlea	Gresik	636
		Tarjun	809
		Bitung	290
100.	Saumlaki	Gresik	725
		Tarjun	898
		Bitung	535
101.	Masohi	Gresik	668
		Tarjun	841
		Bitung	355
EE. MALUKU UTARA			
102.	Ternate	Gresik	770
		Tarjun	920
		Bitung	195
103.	Tobelo	Gresik	885

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
		Tarjun	1035
		Bitung	235
104.	Labuha	Gresik	695
		Tarjun	845
		Bitung	205
105.	Sanana	Gresik	619
		Tarjun	769
		Bitung	245
FF. PAPUA			
106.	Biak	Gresik	1042
		Tarjun	1227
		Bitung	565
107.	Nabire	Gresik	1086
		Tarjun	1271
		Bitung	605
108.	Serui	Gresik	1063
		Tarjun	1248
		Bitung	585
109.	Merauke	Gresik	1081
		Tarjun	1266
		Bitung	845
110.	Jayapura	Gresik	1211
		Tarjun	1396
		Bitung	755
111.	Timika	Gresik	950
		Tarjun	1135
		Bitung	640

No.	Titik Serah	Titik Suplai	Ongkos Angkut (Rp/Liter)
GG. PAPUA BARAT			
112.	Sorong	Gresik	812
		Tarjun	987
		Bitung	375
113.	Kaimana	Gresik	829
		Tarjun	1004
		Bitung	510
114.	Manokwari	Gresik	968
		Tarjun	1143
		Bitung	495
115.	Fak-Fak	Gresik	812
		Tarjun	987
		Bitung	425

Catatan: * Terminal BBM/Depot PT Pertamina (Persero)

**Terminal BBM/Depot PT AKR Corporindo

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufon Asrofi